

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

Nama : Ririn Wulandari

NIM : 13401241051

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, ... April 2019

Reviewer

Dr. Eny Khusdarini, M.Hum
NIP 19600304 198601 2 001

Pembimbing

Iffah Nur Hayati, M.Hum
NIP. 19760211 200501 2 001

Rekomendasi pembimbing:

1. Dikirim ke jurnal Student
2. Dikirim ke jurnal Civics
3. Dikirim ke jurnal lain

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTALLY SOUND TOURISM BY THE GUNUNGGKIDUL REGENCY TOURISM OFFICE

Ririn Wulandari dan Iffah Nur Hayati
 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
13401241051@student.uny.ac.id
ririn.dary@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini diangkat berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup. Selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yang meliputi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bidang Pemasaran dan Bina Usaha, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Kepala Bidang Industri dan Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, serta Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Analisis data dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup melalui 3 (tiga) cara yaitu, menetapkan kawasan pariwisata yang berbasis konservasi, mengelola *geopark* Gunungsewu dan melakukan pembinaan dan pengawasan pada masyarakat 2) Hambatan yang hadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup yaitu belum adanya peraturan khusus tentang pengelolaan kawasan pariwisata berbasis konservasi; kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM); kurangnya kesadaran masyarakat pariwisata dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan secara profesional; penegakan pelanggaran kepariwisataan yang terkait dengan lingkungan hidup masih kurang tegas.

Kata Kunci: *Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, penyelenggaraan kepariwisataan, wawasan lingkungan hidup*

ABSTRACT

This article is based on research which aims to describe the efforts of the Gunungkidul Regency Tourism Office in the implementation of environmentally sound tourism. In addition, it also aims to describe the obstacles facing by the Gunungkidul Regency Tourism Office in the implementation of environmentally sound tourism. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Determination of the subject of this research use a purposive technique. The research subjects included, Head of the Gunungkidul Regency Tourism Office, the Head of Marketing and Business Development, the Head of Destination Development Division, the Head of Industry and Institutions at the Gunungkidul Regency Tourism Office, and The Secretary of the Gunungkidul Regency Tourism Office. Data collection is done through interview techniques and documentation. To examination the data validity apply the Cross Check technique. Data analysis use inductive data analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: 1) The efforts that have been carried out by the Gunungkidul Regency Tourism Office in the implementation of environmentally sound tourism through three ways, i.e establishing a conservation-based

tourism area, managing the Gunung Sewu geopark and conducting guidance and supervision for the community 2) The obstacles facing by Gunungkidul Regency Tourism Office in the implementation of environmentally sound tourism include, the absence of special regulations regarding conservation-based tourism area management; lack of human resources (HR); lack of awareness of the tourism community in carrying out tourism activities in a professional manner; enforcement of tourism infraction related to the environment is not firm yet.

Keywords: *Gunungkidul Regency Tourism Office, Implemation tourism, Environmentally Sound*

PENDAHULUAN

Periwisata merupakan sektor unggulan di Indonesia, dengan potensi dari segi alam maupun kebudayaannya Indonesia memiliki modal besar. Sektor pariwisata juga telah menjadi sektor alternatif dalam sektor ekonomi yang mampu menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Menurut Oka A. Yoeti (2008:25) pariwisata jugadikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan, karena dampak yang diberikan terhadap kehidupan perekonomian di negara yang di kunjungi wisatawan. Kedatangan wisatawan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada penduduk setempat.

Melihat keadaan geogrfis Indonesia yang luas dan banyak diantaranya terpisah oleh perairan, maka perkembangan kepariwisataan akan lebih mudah di tangani oleh pemerintah daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolute, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu wajib dan pilihan. Pariwisata sendiri termasuk urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan dimana dipilih berdasarkan potensi daerah tersebut.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata besar adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY ini telah menjadi salah satu ikon pariwisata indonesia yang telah menarik banyak wisatawan. Ketika membicarakan pariwisata di DIY, maka salah satu daerah unggulannya adalah Kabupaten Gunungkidul. Andalan obyek wisata Kabupaten Gunungkidul adalah wisata alamnya, mulai dari wisata pantai, goa, air

terjun, sungai dan wisata alam lainnya. Kabupaten Gunungkidul juga memiliki banyak tempat wisata diseluruh daerahnya, faktor banyaknya jumlah obyek wisata alam di Kabupaten Gunungkidul adalah karena luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sendiri mencapai 1.485,36 km² sehingga menjadikan Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah paling luas dari daerah di DIY.

Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul telah berkembang pesat dari tahun ke tahunnya. Namun dibalik pesatnya perkembangan pariwisata Kabupaten Gunungkidul, dibarengi dengan munculnya berbagai dampak negatif dari penyelenggaraan kepariwisataan tersebut. Hal ini terjadi karena pariwisata seperti dua sisi mata uang, dimana satu sisi memiliki dampak positif dan sisi lainnya adalah dampak negatif yang tidak dapat dipisahkan. Dampak negatif perkembangan pariwisata diantaranya adalah dampak pariwisata terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Dampak negatif pariwisata pada lingkungan hidup ini merupakan dampak yang merusak dan memperburuk keadaan bumi dan mengancam kelangsungan makhluk hidup. Pariwisata dapat membahayakan kelestarian lingkungan hidup, misalnya pembuangan sampah sembarangan di lokasi pariwisata, pembuangan limbah hotel dan tempat penunjang pariwisata lain nya, kerusakan terumbu karang, perambahan hutan, dan perusakan sumber-sumber hayati yang tidak terkendali (Yoeti,2008: 23-24).

Dampak pariwisata pada lingkungan hidup tidak hanya dapat merusak lingkungan, yang nantinya akan mengurangi daya dukung masyarakat sekarang maupun yang akan datang. Dampak pada lingkungan hidup ini juga

dapat berdampak pada kegiatan kepariwisataan itu sendiri. keadaan lingkungan di daerah pariwisata akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Daerah obyek wisata yang terjaga dan indah akan membuat wisatawan nyaman dan kemungkinan melakukan kunjungan kembali. Sebaliknya apa bila lingkungan daerah wisata rusak maka wisatawan akan kecewa dan kemungkinan untuk melakukan kunjungan kembali rendah.

Salah satu masalah yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah terancamnya kawasan karst. Kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yaitu 53,70% dari luas Kabupaten Gunungkidul itu sendiri. kawasan karst Kabupaten Gunungkidul tersebut termasuk dalam kawasan *Geopark* Gunung Sewu. *Geopark* Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul terancam mengalami kerusakan karena akibat dari penyelenggaraan kepariwisataan, salah satunya kasus pembangunan hotel dan vila di dekat Pantai Seruni.

Pembangunan hotel dan vila di Pantai Seruni oleh PT. Gunung Samudra Tirtomas, pembangun ini dapat membuat status *Geopark* Gunung Sewu dicabut. Direktur Walhi Yogyakarta Halik Sandra, mengatakan UNESCO dapat mencabut status *Geopark* Gunung Sewu jika terjadi kerusakan bentang alam di wilayah bukit karst tersebut. Kawasan bukit karst yang terletak di dekat Pantai Seruni, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul ini katanya telah dipangkas dan akan dibangun hotel dan vila. Halik menjelaskan pembangunan ini dapat membuat daerah resapan air menyusut. Efeknya dikhawatirkan menimbulkan banjir ke sawah-sawah penduduk yang di bawahnya. (<http://m.metrotvnews.com/read/2017/07/31/737263/walhi-klaim-status-geopark-Gunung-Sewu-bisa-dicabut> diakses pada tanggal 18 Agustus 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sugeng Yulianto pada tahun 2016 yang berjudul “Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” bahwasanya kegiatan pariwisata yang terjadi di Desa

Nglanggeran mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut meliputi lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya yang disederhanakan menjadi tiga poin utama sebagai berikut. *Pertama*, telah terjadi lingkungan fisik yang masih tergolong sedang. *Kedua*, terjadi kerusakan lingkungan biotik yang juga tergolong dalam kerusakan sedang. Kerusakan lingkungan biotik di Desa Nglanggeran utamanya pada hilangnya vegetasi dan terganggunya ruang hidup organisme di jalur pendakian dan di sekitar embung buatan. *Ketiga*, pada lingkungan kultur juga terjadi pergeseran, yaitu dimana corak relasi sosial lebih menggunakan logika ekonomi di bandingkan kegotongroyongan, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup yang cenderung meningkat, masalah keamanan dari tindak pidana pencurian, masalah persampahan, termasuk perubahan lanskap yang semakin meninggalkan corak tradisional, termasuk lonjakan harga properti.

Masalah pariwisata lain yang dapat berdampak pada lingkungan hidup, diantaranya penumpukan wisatawan di obyek wisata Goa Pindul setiap libur panjang. Penumpukan wisatawan di Goa Pindul ini dapat mengakibatkan ekosistem Goa Pindul karena besarnya volume wisatawan dalam satu waktu apabila tidak ada batas minimal jumlah wisatawan yang dapat masuk kedalam goa.

Masalah-masalah lingkungan tersebut yang terjadi akibat penyelenggaraan kepariwisataan tersebut perlu diatasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pariwisata telah menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia maka pengembangan pariwisata juga perlu diperhatikan berbagai dampaknya pada lingkungan hidup.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan seperti yang di inginkan maka salah satunya adalah melakukan pembangunan yang tidak merusak lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 3 bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan. Pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Konsep pariwisata yang berkelanjutan tersebut yaitu apabila memuat hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kepariwisataan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat setempat;
- 2) Kegiatan kepariwisataan tersebut tidak merusak lingkungan;
- 3) Kegiatan kepariwisataan tersebut bertanggung jawab secara sosial;
- 4) Kegiatan kepariwisataan tersebut tidak bertentangan dengan budaya setempat (Djafar, 2015: 49-50).

Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Diselenggarakannya kepariwisataan memiliki berbagai tujuan salah satu tujuannya yaitu melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya. Berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan pariwisata, pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai usur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata belum secara maksimal menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup memiliki prinsi-prinsip untuk penyelenggaraan suatu pembangunan yang di inginkan, prinsip tersebut yaitu:

1. Integratif atau terpadu yang artinya suatu program pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan

yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.

2. Membangun kemandirian, prinsip ini yaitu untuk meberdayakan SDM dalam pembangunan tersebut. Dimana program pembangunan dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan SDM terhadap bantuan dan sokongan pihak lain dalam meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengerahkan kemampuan sendiri.
3. Menciptakan keadilan antargenerasi, yang artinya dalam memanfaatkan sumber daya alam harus dilandasi dengan pertimbangan generasi yang akan datang. Maka, pemanfaatan sumber daya alam juga harus dibarengi dengan pemeliharaan untuk menjamin berlangsungnya keadilan antargenerasi (Saptari, 2014: 1.7-1.12).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup di kabupaten Gunungkidul dan hambatan-hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul pada bulan Agustus 2017 sampai dengan November 2018, kemudian dilakukan penambahan data pada September 2018.

Subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive*, yaitu subjek dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016: 216). Subjek penelitian meliputi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bidang pemasaran dan bina usaha, Kepala Bidang pengembangan destinasi, Kepala Bidang industri dan kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, serta Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan cara *cross check*. Analisis data dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang Berwawasan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul telah menyelenggarakan Kepariwisataaan. Penyelenggaraan kepariwisataaan ini berdasarkan visi dan misi pembangunan kepariwisataaan daerah Kabupaten Gunungkidul telah mengarah kepada penyelenggaraan kepariwisataaan yang berwawasan lingkungan hidup.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataaan yakni dengan menetapkan kawasan pariwisata yang berbasis konservasi, mengelola *Geopark* Gunung Sewu dan melakukan pembinaan dan pengawasan pada masyarakat.

1. Menetapkan kawasan pariwisata yang berbasis konservasi

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan kawasan wisata berbasis Konservasi yaitu berkaitan dengan penetapan wilayah pembangunan pariwisata. Wilayah pembangunan pariwisata termuat dalam Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Wilayah pembangunan pariwisata tersebut terdiri dari kawasan startegis pariwisata dan kawasan pembangunan pariwisata. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau yang memiliki potensi pengembangan pariwisata dan mempunyai pengaruh penting dalam satu atau dua lebih aspek. Potensi dan aspek tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Sedangkan kawasan pembangunan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi wisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataaan. Kawasan pariwisata berbasis konservasi sendiri telah ditentukan dalam KSP. KSP sendiri terdiri dari 6 kawasan, yaitu KSP I, KSP II, KSP III, KSP IV, KSP V, dan KSI VI.

Dalam rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Gunungkidul sendiri pembangunan daya tarik wisata yang dilakukan berdasarkan prinsip kesinambungan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, serta pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya wisata.

Kawasan khusus konservasi pada masing-masing KSP, yaitu:

1. Pada KSP I terdapat Hutan Wisata Turunan (*Geosite*) sebagai wisata berbasis konservasi dan pendidikan;
2. Pada KSP II terdapat Pantai Sanglen sebagai wisata konservasi;
3. Pada KSP III terdapat taman keanekaragaman hayati Bajo, taman keanekaragaman Koesnadi Hardjasoemantri, dan Gunung Batur sebagai kawasan wisata alam berbasis konservasi dan pendidikan. Pada KSP

ini juga desa wisata dan desa budaya dikembangkan dengan wisata pantainya yang didukung pendidikan, konservasi dan petualangan;

4. Pada KSP IV terdapat Taman Hutan Raya Bunder, sebagai kawasan wisata alam berbasis konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan dan tempat wisata Telaga Kuning serta lokasi *out bond* Jelok. Pada KSP ini juga desa wisata dan desa budaya dikembangkan dengan wisata pantainya yang didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.
5. Pada KSP V terdapat Suaka Marga Satwa sebagai wisata alam pegunungan didukung pendidikan dan konservasi. Pada KSP ini juga desa wisata dan desa budaya dikembangkan dengan wisata pantainya yang didukung pendidikan, konservasi dan petualangan.

Pengelolaan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul pada kawasan wisata khusus konservasi seharusnya berpedoman pada dokumen pengelolaan lingkungan akan tetapi belum banyak kawasan wisata khusus konservasi yang memiliki dokumen pengelolaan sendiri sehingga selama ini masih berpedoman kepada dokumen rencana pengembangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup. Contoh dari salah satu pedoman pengelolaan kawasan konservasi tersebut diantaranya apabila kawasan konservasi tersebut masuk dalam kawasan karst *Geopark* Gunung Sewu maka salah satu pedomannya adalah dokumen rencana pengelolaan terpadu ekosistem karst DIY.

2. Mengelola *Geopark* Gunung Sewu

Pada tahun 2015 kawasan Gunung Sewu berhasil masuk kedalam *Global Geopark Network* yang ditetapkan oleh UNESCO. Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171/KPTS/TIM/2017 tentang Pembentukan Pengelola Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* Bupati Gunungkidul, bahwa pembentukan pengelola Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* telah ditetapkan dengan peraturan bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul.

Melalui tim pengelola *Geopark* Gunung Sewu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah melakukan banyak kegiatan untuk menjaga dan melestarikan *Geopark* Gunung Sewu. Upaya pengelolaan *Geopark* Gunung Sewu yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul ini telah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan *geopark* yang telah dilakukan tersebut telah memuat program-program yang bertujuan untuk membangun kemandirian atau pemberdayaan sumber daya manusia dan menciptakan keadilan antargenerasi dengan menjaga dan melestarikan lingkungan *Geopark* Gunung Sewu.

Program-program Dinas Pariwisata dalam mengelola *Geopark* Gunung Sewu yang dapat dikatakan memenuhi prinsip membangun kemandirian atau pemberdayaan SDM diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi kompetensi pemanduan goa diadakan di Disbudpar Kabupaten Gunungkidul yang diikuti 50 peserta dari seluruh pemandu Goa di Gunungkidul.
- 2) Diadakan workshop pengelolaan geowisata oleh kelompok studi Karst fakultas geologi UGM.
- 3) Workshop dan sosialisasi study banding geowisata NTB tanggal 19-20 November Disbudpar mengadakan workshop dan sosialisasi geowisata dan dilanjutkan dengan kunjungan ke *Geopark* Rinjani.
- 4) Sosialisasi Disbudpar Gunungkidul ke Pucung Girisubo dan wajib diikuti oleh Pokdarwis Desa Pucung berkenaan dengan adanya salah satu *Geosite* yang terdapat di Desa Pucung yaitu Lembah Bengawan Solo Purba, Lembah kering Purba Sadeng dan Gupak Warak.
- 5) Sosialisasi di Kantor Disbudpar Gunungkidul untuk pembekalan seluruh karyawan Disbudpar Gunungkidul yang berada di lapangan khususnya di *Geosite* untuk menerima arahan dan ilmu serta wawasan tentang pelestarian *Geopark* Gunung Sewu.

- 6) Para Pramuwisata Gunungkidul melakukan sosialisasi tentang Pemahaman Gunungsewu *Global Geopark* di Hotel Cyka Raya Gunungkidul, para pramuwisata dibekali ilmu dan pemahaman tentang Geopark Gunung Sewu.
- 7) Diadakan FGD dengan tema "Kebijakan kelembagaan pengelola pariwisata pada kawasan *Geopark*".
- 8) Diadakan pendidikan dan pelatihan paskibraka Gunungkidul dengan memberikan materi tentang *Geopark* dengan dimaksudkan agar memberikan wawasan kepada para paskibraka tentang *Geopark* Gunungsewu yang *Geositenya* juga berada di Gunungkidul.
- 9) Sekretariat Daerah Gunungkidul mengadakan sosialisasi Tentang Pengetahuan *Geopark* kepada para pelajar SMP SMA disalah satu daerah yang dekat dengan *Geosite*, yaitu Goa Jomblang dan Goa Pindul.
- 10) Dinas Pariwisata mengadakan Sosialisasi *Geopark* dalam rangka pemberdayaan masyarakat *Geopark*.
- 11) Sosialisasi *Geopark* kepada guru kelas SD/MI dan guru IPS MTs/SMP se Gunungkidul di aula Dinas Pendidikan.
- 12) Sosialisasi *Geopark* kepada Guru dan Kepala Sekolah di Gunungkidul oleh Prof Suratman, Prof Denis , Romo Dendi dan Ir. Budi Martono
- 13) Sosialisasi PLSPDB tentang *Geopark* Gunung Sewu/ Daerah Karst di SMA 1 Wonosari.
- 14) Sosialisasi *Geopark* Gunung Sewu di SMK Wonogiri.

Program serta kegiatan yang telah dilakukan pengelola geopark tersebut telah menunjukkan bahwasanya pengelolaan geopark yang telah dilakukan selama ini meliputi berbagai program dan kegiatan. Program pelatihan dan sosialisasi yang telah diberikan pada masyarakat, baik masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata maupun yang tidak berkaitan langsung, diantaranya para pemandu wisata, pengelola *geosite* dan seluruh masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada masyarakat

Masyarakat di sini adalah masyarakat pariwisata yaitu masyarakat berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul, diantaranya adalah kelompok sadar wisata, pemandu wisata dan pengusaha pariwisata. Pembinaan dan pengawasan mencakup sosialisasi, pelatihan dan kampanye sadar wisata dan saptapesona. Dinas Pariwisata memberikan pembinaan dan pengawasan kepada mereka agar mereka menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat menjalankan kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk memberikan Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung.

a. Pembinaan

Pembinaan disini meliputi pemberian izin pengelolaan daya tarik wisata; pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelola daya tarik wisata; pembinaan teknik penyelenggaraan pengelolaan daya tarik wisata; pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata; pembinaan teknis pemasaran/promosi; sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan pemberian penghargaan bagi pengelolaan daya tarik wisata yang berprestasi. Tindakan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat serta dapat meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup tempat mereka bekerja.

1) Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

Kelompok sadar wisata adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Desa dan diresmikan oleh Dinas Pariwisata. Berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keperiwisataan bahwa dalam pengembangan daya tarik wisata dilakukan oleh satu pengelola atau lebih disesuaikan dengan kondisi daya tarik wisata yang ada. Kelompok sadar wisata merupakan komponen penting dalam perkembangan suatu objek wisata. Pokdarwis juga diharapkan mampu menjadi pengendali dan pengawas kegiatan

pariwisata di daerahnya. Dinas Pariwisata tentu memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan berupa bimbingan, pelatihan dan sosialisasi sehingga pokdarwis mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah memberikan berbagai pelatihan, bimbingan dan edukasi kepada pokdarwis sebelum mereka terbentuk dan selama mereka beroperasi.

Pelatihan, bimbingan dan sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan banyak hal yang salah satunya adalah bagaimana mengelola lingkungan yang ada di objek wisata mereka. Pelatihan, bimbingan dan sosialisasi tersebut diberikan melalui berbagai kegiatannya diantaranya adalah mengajak pokdarwis dan melakukan kunjungan ke daerah/lokasi wisata yang telah memiliki pengelolaan lingkungan yang sudah baik, mengadakan berbagai perlombaan yang berkaitan dengan kebersihan dan pelestarian lingkungan objek wisata, mendorong pokdarwis untuk mengikuti berbagai kompetisi desa wisata dan objek wisata, pembinaan dalam pelestarian lingkungan yang berkerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, sosialisasi mengenai *Geopark* Gunung Sewu dan lain sebagainya.

2) Pemandu wisata /Pramuwisata

Pembinaan kepada pemandu wisata dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah memberikan informasi mengenai *Geopark* Gunung Sewu dan kekarstan serta memberikan pelatihan bagaimana menjaga lingkungan ditempat wisata. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dilakukan Dinas Pariwisata diantaranya pelatihan pemandu wisata terpadu yang dilaksanakan tiap tahunnya, pemberian sertifikasi kompetensi pemanduan Goa, wisata ekowisata dan outbound serta sertifikasi pemandu umum. Pelatihan pemandu wisata merupakan kegiatan yang sangat penting karena banyaknya jenis pemandu wisata maka perlu adanya pelatihan tersendiri bagi mereka-mereka yang ingin menjadi pemandu wisata.

Memberikan pelatihan yang baik terhadap pemandu wisata tentu akan

memberikan hasil yang baik pula, diharapkan dengan pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul para pemandu wisata dapat mengawasi dan mendorong wisatawan menjaga dan melestarikan lingkungan di tempat wisata.

3) Pelaku usaha pariwisata

Pelaku usaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Usaha pariwisata sendiri adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pembinaan dapat berupa kegiatan sosialisasi, kampanye sadarwisata dan sapatapesona, pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata, serta lomba kebersihan antar destinasi wisata dan usaha wisata.

Berdasarkan rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2014, 2015, dan 2016 terdapat program yang berkaitan dengan pembinaan pada pelaku usaha pariwisata. Pada tahun 2014 terdapat program pengembangan kemitraan yang salah satu kegiatannya adalah pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang terselenggara. Kegiatan yang telah terlaksanakan diantaranya pelatihan manajemen hotel dan rumah makan, pelatihan pengelolaan usaha spa/salon, pelatihan pedagang obyek wisata, dan pendampingan jasa usaha pariwisata yang TDUP.

Tahun 2015 dan 2016 pada kedua kegiatan yang sama terlaksana beberapa kegiatan baik yang telah menjadi event rutin bulanan maupun tahunan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul di dalam prosesnya diberikan juga materi-materi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan..

b. Pengawasan

Pengawasan di sini dapat berupa kegiatan kunjungan seperti monitoring ataupun secara tidak langsung dengan melalui kegiatan atau program-program

tertentu yang melibatkan komponen masyarakat pariwisata.

1) Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

Setelah pokdarwis terbentuk dan Dinas Pariwisata juga telah memberikan pembinaan, selanjutnya yang diperlukan adalah suatu pengawasan terhadap pokdarwis apakah pokdarwis beroperasi secara professional atau tidak. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melakukan pengawasan terhadap Pokdarwis ketika diadakan kunjungan/monitoring maupun kegiatan yang melibatkan pokdarwis-pokdarwis di Gunungkidul. Monitoring dilakukan secara rutin minimal enam bulan sekali, sedangkan kegiatan pengawasan lain dapat dilakukan ketika Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki kegiatan atau program yang melibatkan pokdarwis.

2) Pemandu wisata/Pramuwisata

Untuk menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup maka perlu adanya pengendalian/pengawas wisatawan yang mampu mendorong wisatawan ikut serta dalam malakukan pelestarian lingkungan hidup di area objek wisata. Maka unsur pengendali disini yang paling tepat adalah para pemandu wisata karena merekalah yang paling dekat dengan wisatawan dan yang memandu perjalanan wisata tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terhadap para pemandu wisata melalui kunjungan dan kegiatan yang mengikutsertakan para pemandu wisata. Pada saat mengadakan kegiatan seperti pelatihan pemandu wisata Dinas Kabupaten Gunungkidul dapat melakukan pengawasan atau upaya pengendalian. Pengawasan yang dilakukan ketika dilakukan kegiatan atau program lain dapat berupa pemriksaan sertifikat, melihat kemampuan dan pengetahuan pemanduwisata dan lain sebagainya.

3) Pelaku usaha pariwisata

Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata melalui perijinan pembuatan TDP dan TDUP sebagai pengendali pertumbuhan pariwisata. Menjadikan TDP dan TDUP sebagai upaya

untuk mengawasi dan mengendalikan perkembangan usaha pariwisata di Kabupaten Gunungkidul agar dapat menyelenggarakan pariwisata yang berwawasan lingkungan hidup dapat dilihat bahwasanya dalam syarat pendaftaran TDP dan TDUP dokumen lingkungan hidup merupakan salah satu dokumen wajib.

Kerjasama antara dinas-dinas di Gunungkidul untuk memberikan Pembinaan dan pengawasan sangatlah penting karena untuk menciptakan penyelenggaraan pariwisata yang berwawasan lingkungan hidup tentu memerlukan sinergitas antara perangkat-perangkat daerah.

Hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Dalam Menyelenggarakan Kepariwisataan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup

1. Belum Adanya Peraturan Khusus Tentang Pengelolaan Kawasan pariwisata Berbasis Konservasi

Ditetapkannya kawasan pariwisata berbasis konservasi di Kabupaten Gunungkidul sampai sekarang belum disertai dengan suatu pengelolaan yang khusus pada kawasan pariwisata berbasis konserasi. Pengelolaan kawasan pariwisata berbasis konservasi masih berupa dokumen-dokumen yang dianggap sesuai dengan pengelolaan konservasi. Belum adanya peraturan khusus ini menjadi hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pariwisata di kawasan pariwisata berbasis konservasi. Peraturan yang jelas tentang pengelolaan kawasan pariwisata berbasis konservasi tentu akan memudahkan penyelenggaraan kepariwisataan yang ada pada kawasan tersebut.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Kekurangan SDM ini mengakibatkan lemahnya dan tidak optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisatapada penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah SDM setiap bidangnya kurang lebih hanya sekitar 4-5 orang dengan jumlah SDM yang sedikit kemudian dibandingkan dengan luas

Kabupaten Gunungkidul yang $\pm 1.485,36$ km² atau $\pm 46,63\%$ dari luas seluruh wilayah DIY, serta jumlah objek wisata yang sangat banyak yaitu 170 obyek wisata pada tahun 2016, jumlah tersebut belum termasuk tempat wisata buatan dan budaya. Kurangnya sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul menyebabkan kurang optimalnya pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kepariwisataan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Pariwisata Dalam Menjalankan Kegiatan Kepariwisataan Secara Professional

Menjalankan pariwisata secara professional dapat membuat tujuan pariwisata yang diinginkan tercapai. Menjalankan pariwisata secara professional seperti, memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, mengelola objek wisata dengan baik serta menjaga lingkungannya agar tetap terjaga akan meningkatkan kepuasan wisatawan sehingga wisatawan akan berkunjung kembali. Kurangnya kesadaran ini menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan *Geoparak* Gunung Sewu maupun dalam upaya pembinaan dan pengawasan.

4. Penegakan Pelanggaran Kepariwisataan Yang Terkait Dengan Masalah Lingkungan Hidup Masih Kurang Tegas

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk menindak pelanggaran peraturan pariwisata baik secara umum maupun yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penegakan pelanggaran yang kurang tegas dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan hidup di Kabupaten Gunungkidul seperti dalam upaya pengawasan masyarakat pariwisata.

Kurang baiknya penegakan yang dilakukan terhadap pelanggaran pariwisata yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat berakibat kepada semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata dan wisatawan. Kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul

semakin berkembang pesat dan hal tersebut akan menarik banyak investor dan parapengusaha untuk membuka atau menjalankan usaha pariwisata di Gunungkidul dan apabila tidak di kendalikan dan di tindak dengan benar maka akan menjadi penghambat penyelenggaraan tugas-tugas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul itu sendiri. Sinergitas yang baik antar perangkat daerah dalam penindakan pelanggaran kepariwisataan menjadi kunci apabila ingin upaya-upaya untuk menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan hidup dapat dijalankan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup yaitu, menetapkan kawasan pariwisata yang berbasis konservasi, mengelola *geopark* Gunungsewu dan melakukan pembinaan dan pengawasan pada masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup yaitu belum adanya peraturan khusus tentang pengelolaan kawasan pariwisata berbasis konservasi; kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM); kurangnya kesadaran masyarakat pariwisata dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan secara professional; penegakan pelanggaran kepariwisataan yang terkait dengan lingkungan hidup masih kurang tegas.

Saran

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan peraturan khusus tentang pengelolaan kawasan pariwisata berbasis konservasi.
3. Meningkatkan kerjasama dengan dinas-dinas lain dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan sampai dengan pengawasan dan penegakan pelanggaran kepariwisataan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul.
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pendaftaran TDUP dan TDP terhadap para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, agar para pelaku usaha segera mengurus dokumen lingkungan dalam rangka memperoleh TDUP dan/atau TDP, yang persyaratannya harus mencantumkan rencana pengelolaan lingkungan
5. Meningkatkan penindakan pada pelanggaran kepariwisataan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul.

Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gajah Mada: S2 Magister Pengelolaan Lingkungan.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Yoeti, A. Oka. 2008. *Ekonomi Pariwisata, introduksi, informasi, dan implementasi.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, suaib. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pariwisata.* Yogyakarta: Ombak.
- <http://m.metrotvnews.com/read/2017/07/31/737263/walhi-klaim-status-geopark-gunungsewu-bisa-dicabut-di-akses-pada-tanggal-18-agustus-2017>
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.
- Saptasri, Ari, dkk. 2014. *Manajemen Pembangunan dan lingkungan. dalam: Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup.* Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugeng Yulianto. 2016. *Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata di Desa Ngalanggeran,*